

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Konsep Kolaborasi

##### 1. Definisi kolaborasi

Secara etimologis, kata "kolaboratif" berasal dari gabungan kata "co" dan "labor", yang menunjukkan penyatuan upaya atau peningkatan kapabilitas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan bersama. Selanjutnya, istilah "kolaborasi" sering digunakan untuk merujuk pada proses penyelesaian tugas yang melintasi berbagai batas, seperti batas sektor, batas hubungan, bahkan batas negara.<sup>29</sup> Secara terminologis, kolaborasi juga dapat dipahami sebagai tindakan koordinasi konstruktif yang dilakukan secara langsung sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan pembuatan dalam keputusan bersama untuk menggapai sesuatu ataupun terhadap penanggulangan masalah secara bersama-sama.<sup>30</sup>

Kolaborasi merupakan upaya kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencapai keberhasilan yang saling menguntungkan. Ini adalah proses sosial di

---

<sup>29</sup> Choirul Saleh, *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*, (Pustaka Universitas Terbuka, 2020), 4

<sup>30</sup> Choirul Saleh, *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*....6

mana individu saling mendukung dalam usaha mencapai tujuan bersama.<sup>31</sup> Kolaborasi merupakan sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok bekerja sama dengan saling mendukung dan memahami satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.<sup>32</sup> Kolaborasi didefinisikan sebagai kerjasama dari berbagai pihak yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Chiu, kolaborasi terjadi ketika sekelompok orang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh individu secara sendiri, hingga tujuan bersama dapat tercapai. Dampak dari kegiatan kolaborasi ini adalah terbentuknya hubungan yang mendalam serta komitmen yang baik di antara para anggotanya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini kolaborasi atau kerjasama ini mencakup kerjasama antar lembaga pemerintah. Kerjasama yang dilakukan oleh institusi agama dengan negara dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Bengkulu.

---

<sup>31</sup> Wikan Galuh Widyarto, "Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi," *Jurnal Nusantara*, vol. 4, no.2 (Oktober, 2017), 100–106.

<sup>32</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 156.

<sup>33</sup> Moh. Saiful Hakiki, "Tinjauan Literatur Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Kolaborasi Desain". "WASTU: *Jurnal Wacana Sains dan Teknologi*", Vol. 3 No. 2021, hal. 39

Gray (1989) mengartikan kolaborasi sebagai proses berpikir di mana para peserta memikirkan berbagai aspek dari suatu masalah dan menemukan solusi atas perbedaan dan hambatan dalam pandangan mereka mengenai apa yang bisa dilakukan.<sup>34</sup>

## 2. Manfaat kolaborasi

Selain kolaborasi menjadi salah satu aspek penting yang dilakukan oleh kolaborator, kolaborasi juga memiliki beberapa kelebihan atau manfaat bagi kolaborator dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu secara berkolaborasi dalam suatu organisasi. Beberapa kelebihan atau manfaat yang disebutkan pada kelompok saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### a. *Pooling of talent and strengths*

Kolaborasi yang terjalin bermanfaat dalam mempertemukan berbagai bakat dan kelebihan yang dimiliki masing-masing anggota. Dengan memanfaatkan ilmu, pengalaman, keahlian dan kelebihan yang dimiliki semua anggota, semua itu dapat dioptimalkan dalam kehidupan kolaboratif. Pemanfaatan talenta-talenta yang berbeda ini tentunya harus dikelola dengan baik oleh para pemimpin kolaboratif melalui partisipasi efektif

---

<sup>34</sup> Nia Endri Wiranti dan M Fachri Adnan, "Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengawasan Administrasi Publik Melalui SP4N-LAPOR". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, vol. 8 no 4 tahun 2023. 4182

seluruh anggota, sehingga siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, ketika seorang anggota berusaha menunjukkan keahliannya sekaligus harus menangani aspek teknis suatu masalah, ia memerlukan dukungan anggota lainnya. Kolaborasi yang efektif ditunjukkan ketika anggota lain dapat menyaksikan, mendapatkan manfaat dan menerapkan hal yang sama, sekaligus memberikan dukungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan mencapai hasil yang optimal. Hal inilah yang meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi lebih cepat.

b. *Development of employee skills*

Pada dasarnya, kolaborasi memberikan manfaat timbal balik bagi semua pihak dalam organisasi. Ketika mereka bekerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini membantu meningkatkan keahlian mereka secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, mereka saling berinteraksi, berbagi ide, dan bertukar pengalaman, sehingga mereka semakin memahami cara bekerja sama yang efektif, berpikir secara positif, serta bernegosiasi dan mengoperasikan alat dengan benar. Melalui berbagi dan memberi pengalaman satu sama lain, kualitas kerja mereka meningkat, baik untuk diri mereka sendiri maupun rekan kerja mereka, yang

memperkuat posisi mereka. Pada saat inilah, mereka mulai memperoleh pengetahuan, metode kerja, pengalaman, dan perspektif baru yang sangat berguna untuk menciptakan improvisasi kerja, yang secara positif mempengaruhi pencapaian tujuan baru atau tujuan bersama yang telah disepakati.

c. *Speeds up solution*

Penyelenggaraan kolaborasi dapat mempercepat penyelesaian masalah dengan cepat, tepat, dan menyeluruh. Bahkan, kolaborasi bisa menghasilkan kemajuan kerja yang lebih cepat. Jika ada suatu masalah ‘tertentu’, mungkin masalah tersebut baru bisa diatasi dalam waktu dua atau tiga bulan jika ditangani oleh satu orang atau satu pihak saja. Namun, jika masalah tersebut ditangani bersama-sama oleh banyak pihak yang kredibel dan ahli di bidangnya, besar kemungkinan masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

3. Bentuk-bentuk kolaborasi

a. Kolaborasi primer

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa kelompok dan individu benar-benar bergabung menjadi satu kesatuan. Menurut Ahmadi, kelompok tersebut mencerminkan keseluruhan kehidupan individu, di mana setiap anggota saling berusaha untuk menyelesaikan

tugas masing-masing demi kepentingan seluruh anggota kelompok.

Contohnya dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari, kehidupan keluarga di masyarakat primitive dan sebagainya. Kolaborasi dalam tipe ini terbentuk secara alami di dalam kelompok-kelompok yang dikenal sebagai kelompok primer. Dalam kelompok tersebut, individu cenderung untuk saling bergabung dan berusaha menjadi bagian dari kelompok. Menurut Narwoko, ciri utama dari jenis kolaborasi ini adalah bahwa kelompok-kelompok primer yang kecil, yang bersifat tatap muka, membuat individu lebih cenderung merasa nyaman bekerja dalam tim sebagai anggota tim dari pada bekerja secara individu.

b. Kolaborasi sekunder

Menurut Ahmadi, kolaborasi sekunder ini sangat terstruktur dan bersifat spesialisasi, dimana setiap individu hanya menyumbangkan sebagian dari kehidupannya kepada kelompok yang bersatu. Sikap orang-orang dalam konteks ini cenderung lebih individualistis dan melibatkan perhitungan-perhitungan. Contohnya termasuk kolaborasi di kantor-kantor perdagangan, pabrik-pabrik, lembaga pemerintah, dan sejenisnya.

c. Kolaborasi tersier

Kolaborasi tertier didasarkan pada adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi, kolaborasi tertier ditandai oleh sikap-sikap oportunistis dari pihak-pihak yang terlibat. Struktur organisasi mereka cenderung longgar dan mudah pecah jika alat bersama tersebut tidak lagi mendukung masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contoh dari kolaborasi ini adalah hubungan antara buruh dan pimpinan perusahaan, serta hubungan antara dua partai politik dalam konteks melawan partai ketiga.<sup>35</sup>

4. Proses kolaborasi

Berikut merupakan proses kolaborasi Model Ansell & Gash:

a. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dalam berkolaborasi, interaksi melalui antar muka sangatlah berperan penting. Dialog antar muka berfungsi sebagai sarana mencapai kesepakatan. Komunikasi secara langsung (*face to face dialogue*) merupakan langkah yang strategis untuk mengurangi prasangka yakni opini negatif antar pihak atau lembaga, sekaligus bentuk saling menghormati antar pihak dengan berkomunikasi langsung.

---

<sup>35</sup> Istiqomah, "Manajemen Kolaborasi Pembinaan Tilawah Al-Qur'an Lembaga Imtiqam dan LPTQ" Skripsi. (Bengkulu:2023).  
36

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Kepercayaan merupakan prasyarat yang esensial dalam membangun kolaborasi yang kokoh. Proses membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, karena kolaborasi membutuhkan komunikasi yang intensif dan berkesinambungan, serta adaptasi terhadap situasi terkini, termasuk kemungkinan timbulnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Ansell dan Gash mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:

*“If the prehistory is highly-antagonistic, then policy makers or stakeholders should budget time for effective remedial trust building. If they cannot justify the necessary time and cost, then they should not embark on a collaboration strategy”*<sup>36</sup>

Oleh sebab itu, pembuat kebijakan atau para pemangku kepentingan perlu menyediakan waktu untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan kepercayaan secara efektif. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pelaksanaan kolaborasi tidak semestinya dilanjutkan.

---

<sup>36</sup> Chris Ansell & Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice”, *Journal Of Public Administration Research And Theory*, Volume 18, Issue 4 (2007),

c. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen adalah unsur yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen memiliki hubungan yang erat dengan motivasi mendasar para aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan kolektif. Pemahaman bersama mencakup konsep misi umum (*common mission*), tujuan bersama (*common purpose*), obyektivitas bersama (*common objectives*), serta visi bersama (*shared vision*). Pemahaman ini mengacu pada penyatuan pemikiran dan keselarasan tujuan, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman di antara para aktor yang terlibat.

e. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara merujuk pada efek yang muncul selama berlangsungnya proses kolaborasi, sesuai dengan makna kata "sementara" itu sendiri. Dampak ini menghasilkan umpan balik (*feedback*) yang diharapkan bersifat positif, yang dikenal sebagai *small wins* (kemenangan kecil). Kemenangan kecil tersebut dapat meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam

kolaborasi, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan komitmen satu sama lain.

f. Hasil Akhir (*Outcomes*)

Kolaborasi yang dilaksanakan menghasilkan pencapaian akhir berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>37</sup>

## B. Konsep Institusi Agama

### 1. Definisi institusi agama

Institusi agama adalah entitas yang mengatur kehidupan dan perilaku manusia terkait dengan praktik keagamaan. Selain itu, lembaga agama juga diartikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh komunitas beragama dengan tujuan untuk memajukan kepentingan keagamaan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi lain dari lembaga agama mencakup praktik keagamaan dan sistem kepercayaan dalam masyarakat yang telah distandardisasi dan dirumuskan.<sup>38</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli yaitu sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> M. Husni Tamrin, Wildan Taufik Raharja, *Kolaborasi Membangun Negeri Studi Kasus Pengembangan Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Collaborative Governance*, (Jakarta Timur:Penerbit Akses Prima Cendekia , 2021), 40-43.

<sup>38</sup> Rya Fitrianasari, “Peran Lembaga Agama dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Di Lazdai Kota Bandar Lampung)”, Skripsi. *Terbit* (Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,2019). 22

- a. Menurut Emile Durkheim, lembaga agama adalah sebuah sistem yang mencakup praktik-praktik terkait agama, kepercayaan, dan hal-hal suci yang berperan dalam menyatukan umat.
- b. Menurut Bruce J, lembaga agama adalah sebuah institusi yang bertujuan mengatur kehidupan manusia dalam konteks beragama. Fungsi utamanya adalah membantu dalam pencarian identitas moral, menyediakan tafsiran dan penjelasan, serta meningkatkan solidaritas kelompok.<sup>39</sup>

## 2. Fungsi dan peran institusi agama

Fungsi institusi agama terbagi menjadi dua, yaitu manifes (nyata) dan laten (tersembunyi):

### a. Fungsi Manifes Lembaga Agama

Adapun beberapa fungsi manifes lembaga agama yaitu sebagai berikut:

- i. Edukatif, Lembaga agama berperan dalam memberikan pendidikan moral (fungsi edukatif) kepada para pemeluknya tentang apa yang baik dan buruk sebagai panduan perilaku. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dan dihindari oleh umat beragama.

---

<sup>39</sup> Rya Fitrianasari, "Peran Lembaga Agama.....23

- ii. Penyelamat, Melalui lembaga agama, setiap individu memiliki keyakinan bahwa hidupnya akan terselamatkan, baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya. Manusia tidak dapat menghindari berbagai masalah dalam hidupnya, sehingga agama berperan sebagai penyelamat bagi mereka.
- iii. Pengawas Sosial, Lembaga agama berperan langsung dalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat melalui berbagai larangan yang terdapat dalam kitab suci masing-masing agama. Kitab suci dan ajaran agama memuat sanksi yang akan diterima oleh masyarakat jika melanggar aturan tersebut.
- iv. Persaudaraan, Lembaga agama mampu menyatukan kelompok-kelompok manusia yang beragama dalam hal budaya, ras, dan suku bangsa menjadi satu keluarga besar dalam lembaga agama tersebut. Ikatan persaudaraan terbentuk ketika masyarakat merasakan solidaritas dan kesatuan yang kuat melalui satu kepercayaan agama yang sama.

**b. Fungsi Laten Lembaga Agama**

Fungsi laten lembaga agama adalah menumbuhkan sikap fanatisme. Keyakinan bahwa

agama tertentu lebih unggul dari agama lain dapat menyebabkan fanatisme, yang pada akhirnya dapat mengganggu kerukunan dan ketenteraman dalam kehidupan beragama. Fungsi utama lembaga agama adalah memberikan panduan bagi manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Selain itu, lembaga agama juga memiliki peran lain yang terbentuk melalui interaksi dalam masyarakat. Institusi agama kerap menjadi dasar bagi terciptanya perilaku yang konsisten dan terstruktur di tengah masyarakat. Selain itu, fungsi institusi agama juga meliputi:

1. Membantu individu dalam menemukan dan memahami identitas moralnya.
2. Memberikan penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi lingkungan, baik yang berkaitan dengan alam maupun kehidupan sosial.
3. Meningkatkan kualitas interaksi sosial, memperkuat kohesi dalam masyarakat, dan membangun solidaritas kelompok.<sup>40</sup>

### 3. Macam-macam institusi agama

Lembaga agama dalam masyarakat pada umumnya mencakup diantaranya:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Rya Fitrianasari, "Peran Lembaga Agama ....26-28

- a. Kantor Urusan Agama (KUA), yang berperan dalam mengatur urusan seperti pengaduan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDART) dan administrasi pernikahan.
- b. Departemen Agama (Depag), yang berfungsi sebagai lembaga yang berkontribusi dalam memberikan pendidikan secara komprehensif kepada masyarakat.
- c. Pengadilan Agama adalah salah satu bentuk lembaga agama yang berperan dalam mengatur dan menangani tindakan yang menyimpang dari norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.
- d. Kementerian Agama (Kemenag) merupakan lembaga agama yang memiliki peran strategis sebagai institusi tertinggi di masyarakat, sekaligus menjembatani hubungan dengan lembaga eksekutif, termasuk presiden.

Contohnya lembaga eksternal dalam Islam yaitu seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah, antara lain LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), serta LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah).

---

<sup>41</sup>Rya Fitrianasari, "Peran Lembaga Agama..... 24

#### 4. Ciri-ciri Institusi agama

Lembaga agama memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu sistem kepercayaan
- b. Menjadi manifestasi dari sesuatu yang diyakini sebagai hal yang gaib.
- c. Berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku.
- d. Mempersatukan umat.
- e. Bertujuan untuk memuliakan umatnya.<sup>42</sup>

### C. Konsep Stunting

#### 1. Definisi *stunting*

*Stunting* adalah bentuk gagal pertumbuhan pada anak, yang terjadi karena akumulasi kekurangan gizi yang berlangsung dari masa kehamilan hingga anak mencapai usia 24 bulan.<sup>43</sup> *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit, kematian, dan hambatan dalam pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun mental.<sup>44</sup> *Stunting* disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor

---

<sup>42</sup> Rya Fitrianasari, "Peran Lembaga Agama.....23

<sup>43</sup> Mitra, "Permasalahan Anak Pendek (*Stunting*) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya *Stunting*" *Jurnal Kesehatan Komunitas*. Vol2 No 6, (Mei, 2015), 255

<sup>44</sup> Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan *Stunting* dan Pencegahannya" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol.11, No.1, (Juni 2020), 226

eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat atau negara, dan faktor internal yang mencakup kondisi di dalam lingkungan tempat tinggal anak.<sup>45</sup>

*Stunting* merupakan suatu kondisi gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang akibat pola makan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Kondisi ini dimulai saat janin masih dalam kandungan ibu dan baru muncul hingga anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian pada bayi dan anak kecil, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit, dan menyebabkan pertumbuhan fisik yang kurang optimal di masa dewasa. Selain itu, kemampuan kognitif mereka juga semakin memburuk, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.<sup>46</sup>

Kualitas perkembangan anak di masa depan ditentukan sejak dini, khususnya pada masa balita. Jika perkembangan optimal terjadi pada masa ini, maka tahap-tahap selanjutnya cenderung menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Demikian pula, jika *stunting* pada anak dapat diatasi sejak dini,

---

<sup>45</sup> Anonim, "World Health Organization. Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences.2020", <https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj/en/index1.html>. (10 Januari 2023)

<sup>46</sup> MCA Indonesia. *Stunting dan Masa Depan Indonesia*. Millenn Chall Acc - Indones. 2013.

pertumbuhan dan perkembangan balita dapat diperbaiki. Tujuannya adalah untuk menciptakan balita dengan fungsi motorik, kecerdasan, dan sosial yang baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.<sup>47</sup>

## 2. Dampak *stunting*

Secara umum, terdapat 2 dampak *stunting* yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

### a. Dampak jangka pendek

- i. Meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian.
- ii. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak yang tidak optimal.
- iii. Meningkatnya biaya kesehatan.

### b. Dampak jangka panjang

- i. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya).
- ii. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya.
- iii. Menurunnya kesehatan reproduksi.
- iv. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah.

---

<sup>47</sup> Wahidamunir, "Hubungan Kejadian Stunting dengan Tingkat Perkembangan Anak Usia 48-59 Bulan di Tk Pertiwi Majene," *J-Hest Journal Of Health, Education, Economics, Science, And Tecnology*, Vol.2 no. 1, (2019), 40

v. Produktivitas kapasitas kerja yang tidak optimal.<sup>48</sup>

### 3. Ciri – ciri *stunting*

*Stunting* pada anak ditandai dengan pertumbuhan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua anak yang pendek mengalami *stunting*. Selain mengganggu pertumbuhan, *stunting* juga mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang mengalami *stunting* dapat memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, gangguan berbicara, dan kesulitan belajar, yang berakibat pada prestasi yang buruk di sekolah. Dampak jangka panjang dari *stunting* adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan ketika dewasa.<sup>49</sup>

### 4. Faktor penyebab *stunting*

*Stunting* disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung meliputi kurangnya asupan gizi dan buruknya status kesehatan. Sementara itu, penyebab tidak langsung mencakup aspek seperti tingkat

---

<sup>48</sup> Nur Arina, “Kesiapsiagaan Orang Tua Menghadapi Stunting di Desa Lakwali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Palopo”, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 22

<sup>49</sup> Nur Arina, “Kesiapsiagaan Orang Tua Menghadapi Stunting....” 23

pendapatan, ketimpangan ekonomi, sistem pangan dan kesehatan, urbanisasi, serta faktor-faktor lainnya.<sup>50</sup> Pemahaman tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab *stunting* juga memiliki peran penting, karena diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya *stunting* serta mengurangi angka prevalensi *stunting* di masyarakat.<sup>51</sup> Selain itu juga terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan kondisi gizi ibu yang tidak optimal selama kehamilan, postur tubuh ibu yang pendek, serta pola asuh yang kurang tepat, terutama dalam hal perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak.<sup>52</sup>

*Stunting* berkembang dalam jangka waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- i. Kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang.
- ii. Penghambatan pertumbuhan pada janin.
- iii. Kekurangan energi dalam asupan kalori.

---

<sup>50</sup> Malisa Ariani, "Determinan Penyebab Kejadian Stunting pada Balita: Tinjauan Literatur". *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, vol 11 no. 1, (2020),174

<sup>51</sup> Nova Dwi Yanti, Feni Betriana dan Imelda Rahmayunia Kartika, "Faktor Penyebab Stunting pada Anak: Tinjauan Literatur", *Real In Nursing Journal*, Vol. 3, No.1 (2020), 2

<sup>52</sup> Komalasari,dkk."Faktor-Faktor Kejadian Stunting pada Balita", *Majalah Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 no. 2 (2020), 52

- iv. Perubahan hormon yang dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku.
- v. Sering mengalami infeksi pada awal kehidupan anak.<sup>53</sup>

5. Cara mencegah terjadinya *stunting*

*Stunting* dapat dicegah melalui beberapa cara sebagai berikut:

- i. Memenuhi kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan dan menyusui.
- ii. Melakukan inisiasi menyusui sejak dini dan memberikan ASI eksklusif.
- iii. Memahami pengetahuan mengenai makanan pendamping ASI (MPASI) yang baik dan menerapkannya.
- iv. Membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi *stunting* antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk Ibu Hamil dan Bersalin:
  - i. Mengupayakan jaminan mutu pelayanan antenatal care (ANC) yang terpadu.
  - ii. Meningkatkan angka persalinan di fasilitas kesehatan.

---

<sup>53</sup> Nur Arina, “Kesiapsiagaan Orang Tua Menghadapi Stunting di Desa Lakwali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Palopo”, (Skripsi diterbitkan, program Studi Pendidikan Islam Anak Usia dini Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 22

- iii. Menyelenggarakan program pemberian makanan yang kaya kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM).
  - iv. Melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular.
  - v. Memberantas kecacingan.
  - vi. Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat (KMS) ke dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
  - vii. Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
  - viii. Melakukan penyuluhan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- b. Untuk Balita:
- i. Melakukan pemantauan pertumbuhan balita.
  - ii. Menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita.
  - iii. Mengadakan stimulasi dini perkembangan anak serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Penyuluhan mengenai *stunting* sebaiknya dilakukan disetiap desa atau posyandu dan dilaksanakan setiap bulan. Dalam penyuluhan tersebut, dapat disampaikan informasi tentang gizi anak dan pentingnya ASI eksklusif untuk pertumbuhan anak. Tujuan dari

kegiatan ini adalah agar orang tua, terutama ibu, memahami kesehatan asupan gizi dan pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>54</sup>

#### 6. Penanggulangan *stunting*

Rencana aksi untuk intervensi *stunting* diusulkan terdiri atas lima pilar utama, yaitu:

- a. melalui komitmen dan visi dari pimpinan tertinggi negara.
- b. kampanye nasional yang berfokus pada peningkatan pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas.
- c. upaya konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program di tingkat nasional, daerah, serta masyarakat.
- d. mendorong kebijakan *Food and Nutritional Security*.
- e. pemantauan dan evaluasi.<sup>55</sup>

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjalankan Program gizi spesifik melalui Puskesmas dan Posyandu. Program ini dilakukan sebagai bagian dari Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di 10 kabupaten/kota

---

<sup>54</sup> Nur Arina, “Kesiapsiagaan Orang Tua Menghadapi Stunting..... 24

<sup>55</sup> Latifa Suhada Nisa, “Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, vol.13 No. 2, (Desember 2018), 174

prioritas untuk menangani masalah *stunting* pada anak. Selain itu, terdapat program lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Puskesmas dan Posyandu, yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dengan gizi kurang. Program ini mencakup pembinaan Posyandu, penyuluhan, serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita usia 6-59 bulan yang mengalami kekurangan gizi. Makanan yang disediakan berbasis bahan pangan lokal, misalnya melalui kegiatan Hari Makan Anak (HMA).<sup>56</sup>

#### **D. Kolaborasi Antar Institusi Tinjauan Manajemen**

BAZNAS merupakan lembaga resmi negara yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai lembaga filantropi Islam, BAZNAS selama ini berfokus pada kegiatan sosial keagamaan seperti bantuan ekonomi bagi mustahik. Namun, dalam perkembangannya BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi karitatif, tetapi juga mengambil peran dalam program pembangunan sosial yang lebih luas, termasuk bidang kesehatan masyarakat

---

<sup>56</sup> Rini Archda Saputri dan Jeki Tumanger, “Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia”, *JPI: Jurnal of Political Issues*, Vol.1 No.1, (Juli,2019), 6

seperti penanggulangan *stunting*.<sup>57</sup> Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah* menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>58</sup> Pendayagunaan zakat untuk program kesehatan, seperti pencegahan *stunting*, merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), yang menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia.<sup>59</sup>

Dalam konteks pembangunan nasional, *stunting* tidak hanya dipandang sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai hambatan bagi peningkatan kualitas SDM. Pemerintah melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menekankan bahwa penanganan *stunting* membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>58</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*, (Jeddah: Scientific Publishing Centre, 1999).

<sup>59</sup> A. Rohman & I. Muda, "Optimalisasi Dana Zakat untuk Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019): 102–110.

lembaga keagamaan.<sup>60</sup> Oleh karena itu, keterlibatan BAZNAS dalam program ini menunjukkan perluasan peran lembaga zakat sebagai aktor pembangunan sosial yang mendukung tercapainya kesejahteraan dan keadilan.<sup>61</sup>



---

<sup>60</sup> Bappenas, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024*, (Jakarta: Bappenas, 2018).

<sup>61</sup> A. Hidayat, “Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21, No. 2 (2018): 123–136.